



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA.

LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN

TAHUN ANGGARAN

A. PENGGUNAAN BMN

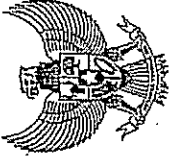
Kode KPBB/Satker : ...

Nama KPBB/Satker : ...

No	Uraian BMN ¹⁾	Surat Keputusan/Penetapan Status Penggunaan dari Pengelola Barang						Penggunaan BMN			Keterangan
		Kuantitas (m ² /unit)	Nilai Perolehan (Rp)	Nomor SK	Tanggal SK	Instansi yang Menerbitkan SK ²⁾	Dipergunakan sesuai Tugas dan Fungsi ³⁾	Tidak Dipergunakan untuk Tugas dan Fungsi (Idle) ³⁾	Digunakan Pihak Lain ⁴⁾		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	I. Tanah dan/atau bangunan										
	II. Selain tanah dan/atau bangunan ⁵⁾										

Keterangan:

- 1) Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang
- 2) Diisi sesuai dengan penerbit SK : Dirjen Kekayaan Negara/Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL;
- 3) Diisi "ya" atau "tidak";
- 4) Diisi pihak lain yang menggunakan BMN;
- 5) Barang-barang yang harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

B. PEMANFAATAN BMN

Kode KPBB/Satker : ...

Nama KPBB/Satker : ...

No.	Uraian BMN ¹⁾	Uraian Pemanfaatan		Surat Persetujuan/Keputusan Pengelola Barang			Penerimaan Negara / PNB ⁵⁾		Keterangan
		Jenis ²⁾	Mitra ³⁾	Nomor Surat	Tanggal Surat	Instansi yang Menerbitkan Surat Persetujuan ⁴⁾	Nilai (Rp)	Tanggal Setor ⁶⁾	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Keterangan:

- 1) Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang;
- 2) Diisi dengan jenis pemanfaatan : sewa/pinjam pakai/kerjasama pemanfaatan/bangun guna serah atau bangun serah guna;
- 3) Diisi dengan mitra/rekanan pemanfaatan untuk pinjam pakai/KSP/BGS/BSG, dan khusus untuk sewa adalah sewa dengan jangka waktu minimal satu tahun;
- 4) Diisi sesuai dengan pemberbit SK : Dirjen Kekayaan Negara/Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL;
- 5) Apabila ada penerimaan negara/PNB;
- 6) Diisi tanggal penyetoran ke kas negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

C. PEMINDAHTANGANAN BMN

Kode KPB/Satker : ...

Nama KPB/Satker : ...

No	Uraian BMN ¹⁾	Uraian Pemindahtanganan		Surat Persetujuan/Keputusan Pengelola Barang			Penerimaan Negara/PNBP ⁵⁾		Keterangan
		Jenis ²⁾	Mitra ³⁾	Nomor Surat	Tanggal Surat	Instansi yang Menerbitkan Surat Persetujuan/Keputusan ⁴⁾	Nilai (Rp)	Tanggal Setor ⁶⁾	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Keterangan:

- 1) Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang;
- 2) Diisi dengan jenis pemindahtanganan : penjualan/tukar menukar/hibah/penyertaan modal pemerintah pusat;
- 3) Diisi dengan mitra/penerima pemindahtanganan BMN;
- 4) Diisi sesuai dengan penerbit SK : Dirjen Kekayaan Negara/Kepala Kanwil DJKN/Kepala KPKNL;
- 5) Apabila ada penerimaan negara/PNBP;
- 6) Diisi tanggal penyetoran ke kas negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA.

- 4 -

D. LAPORAN HASIL PENERTIBAN

Kode KPB/Satker : ...

Nama KPB/Satker : ...

No.	Uraian BMN ¹⁾	PENERTIBAN ²⁾		KETERANGAN
		PENGGUNAAN (3)	PEMANFAATAN (4)	
(1)	(2)			(6)

.....
Kepala.....³⁾
Selaku Kuasa Pengguna Barang

.....
.....

Keterangan:

- 1) Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang;
- 2) Uraian penertiban yang telah dilakukan terkait pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN
- 3) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM
usb
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
BIRU LUMUT *
GIARTO
NIP 1959042019840219901
SEKRETARIA UMUM

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR : 244 /PMK.06/2012 TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA

FORMAT SURAT PERMINTAAN PENJELASAN TERTULIS

KOP 1)

Nomor : S- 2)

Tanggal, Bulan, Tahun

Sifat : Segera

Hal : Permintaan Penjelasan Tertulis

Yth 3)

Sehubungan dengan hasil pemantauan yang kami lakukan terhadap pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaan Saudara, diminta Saudara menyampaikan kepada kami penjelasan/klarifikasi terkait hal-hal sebagai berikut:

1. 4)
2.
3.
4.
5. dst.

Penjelasan/jawaban tertulis beserta dokumen pendukungnya, kiranya dapat kami terima paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat ini.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal/Kepala
Kanwil.../Kepala KPKNL ..., 5)

.....
NIP

Tembusan: 6)

1. Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. Menteri/Pimpinan.....;
3. Inspektur Jenderal/Pengawas Internal.....;
4. Direktur BMN;
5. Kepala Kanwil ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keterangan pengisian format surat permintaan penjelasan tertulis:

- 1) Disesuaikan dengan ketentuan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan.
- 2) Disesuaikan dengan ketentuan tata persuratan dinas di lingkungan DJKN.
- 3) Diisi Kepala Satuan Kerja (Kuasa Pengguna Barang) atau Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga (Pengguna Barang) dan alamat kantor.
- 4) Diisi dengan hal-hal yang diminta penjelasan/klarifikasinya.
- 5) Disesuaikan dengan pihak yang meminta penjelasan.
- 6) Tembusan disesuaikan dengan Kementerian/Lembaga (Pengguna Barang) dan jenjang organisasi DJKN.

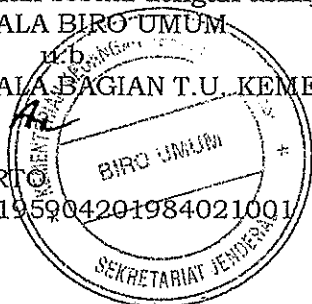
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

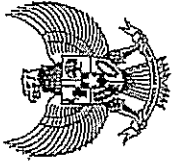
LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN
TAHUN ANGGARAN

A. PENGGUNAAN BMN
KPKNL ...

No.	Uraian KPB/Satker ¹⁾	Keputusan/Penetapan Status Penggunaan oleh Pengelola Barang		Dipergunakan sesuai Tugas dan Fungsi ³⁾		Tidak Dipergunakan untuk Tugas dan Fungsi (Idle) ³⁾		Digunakan Pihak Lain ³⁾	Keterangan
		Kuantitas ²⁾ (m ² /unit)	Nilai Perolehan ²⁾ (Rp)	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	KPB/Satker ¹⁾ a. Tanah dan/atau bangunan b. Selain Tanah dan/atau bangunan								
2... dst.									

Keterangan:

- 1) Diisi Nama dan Kode KPB/Satker;
- 2) Diisi rekapitulasi kuantitas dan nilai perolehan yang sudah ditetapkan status penggunaan oleh Pengelola Barang, dirinci : tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- 3) Diisi rekapitulasi per KPB/Satker.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**B. PEMANFAATAN BMN
KPKNL ...**

No	Uraian KPB/Satker ¹⁾	Jenis Pemanfaatan ²⁾				Jumlah Penerimaan Negara/PNBP (Rp) ²⁾	Keterangan
		Sewa	Pinjam Pakai	Kerjasama Pemanfaatan	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KPB/Satker ¹⁾ a. Tanah dan/atau bangunan b. Selain Tanah dan/atau bangunan						
2... dst							

Keterangan:

- 1) Diisi Nama dan Kode KPB/Satker;
- 2) Diisi rekapitulasi per KPB/Satker, dirinci : tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

C. PEMINDAHTANGGAPAN BMN
KPKNL ...

No	Uraian KPB/Satker ¹⁾	Jenis Pemindahtanganan ²⁾				Jumlah Penerimaan Negara/PNBP (Rp) ²⁾	Keterangan
		Penjualan	Tukar Menukar	Hibah	Penyerahan Modal Pemerintah Pusat		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	KPB/Satker ¹⁾ a. Tanah dan/atau bangunan b. Selain Tanah dan/atau bangunan						
2... dst							

Keterangan:

- 1) Diisi Nama dan Kode KPB/Satker;
- 2) Diisi rekapitulasi per KPB/Satker, dirinci : tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

D. LAPORAN HASIL INVESTIGASI

KPKNL

No.	Uraian KPB/Satker ¹⁾	Uraian BMN ²⁾	INDIKASI PENYIMPANGAN DAN HASIL INVESTIGASI ³⁾		TINDAK LANJUT INVESTIGASI ⁴⁾	
			PENGGUNAAN	PEMANFAATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

.....
Kepala KPKNL

.....
.....

Keterangan:

- 1) Diisi Nama dan Kode KPB/Satker;
- 2) Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang;
- 3) Uraian indikasi penyimpangan dan hasil investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN;
- 4) Uraian tindak lanjut investigasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRU UMUM
 UPTD
 KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
 BIRU UMUM *

GIARTO
 NIP 195904201984021003

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMN
 TAHUN ANGGARAN

A. PENGGUNAAN BMN

KANWIL ...

No.	Uraian KPKNL dan KPB/Satker	Penetapan Status Penggunaan oleh Pengelola Barang		Dipergunakan sesuai Tugas dan Fungsi ³⁾		Tidak Dipergunakan untuk Tugas dan Fungsi (<i>Idle</i>) ³⁾		Digunakan Pihak Lain ³⁾	Keterangan
		Kuantitas ³⁾ (m ² /unit)	Nilai Perolehan ³⁾ (Rp)	Ya	Tidak	Ya	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I. KPKNL									
1.	KPKNL ¹⁾ a. Tanah dan/atau bangunan; b. Selain Tanah dan/atau bangunan								
2... dst.									
II. KPB / Satker									
1.	KPB/Satker ²⁾ a. Tanah dan/atau bangunan; b. Selain Tanah dan/atau bangunan								
2... dst.									

Keterangan:

- 1) Diisi Nama KPKNL;
- 2) Diisi Nama dan Kode KPB/Satker;
- 3) Diisi rekapitulasi per KPKNL dan per KPB/Satker, dirinci : tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**B. PEMANFAATAN BMN
KANWIL ...**

No.	Uraian KPKNL dan KPB/Satker	Jenis Pemanfaatan ³⁾				Jumlah Penerimaan Negara/PNEP (Rp) ²⁾	Keterangan
		Sewa (3)	Pinjam Pakai (4)	Kerjasama Pemanfaatan (5)	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. KPKNL							
1.	KPKNL ¹⁾ a. Tanah dan/atau bangunan; b. Selain Tanah dan/atau bangunan						
2... dst.							
II. KPB/Satker							
1.	KPB/Satker ²⁾ a. Tanah dan/atau bangunan; b. Selain Tanah dan/atau bangunan						
2... dst.							

Keterangan:

- 1) Diisi Nama KPKNL;
- 2) Diisi Nama dan Kode KPB/Satker;
- 3) Diisi rekapitulasi per KPKNL dan per KPB/Satker, dirinci : tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA.

- 3 -

C. PEMINDAHTANGANAN BMN

KANWIL ...

No.	Uraian KPKNL dan KPB/Satker	Jenis Pemindahtanganan ³⁾				Jumlah Penerimaan Negara/PNEBP (Rp) ³⁾	Keterangan
		Penjualan	Tukar Menukar	Hibah	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. KPKNL							
1.	KPKNL..... ¹⁾ a. Tanah dan/atau bangunan; b. Selain Tanah dan/atau bangunan						
2... dst.							
II. KPB/Satker							
1.	KPB/Satker ²⁾ a. Tanah dan/atau bangunan; b. Selain Tanah dan/atau bangunan.						
2... dst.							

Keterangan:

- 1) Diisi Nama KPKNL;
- 2) Diisi Nama dan Kode KPB/Satker;
- 3) Diisi rekapitulasi per KPKNL dan per KPB/Satker, dirinci : tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

**D. LAPORAN HASIL INVESTIGASI
KANWIL**

No.	Uraian KPKNL dan KPB/Satker	Uraian BMN ³⁾	INDIKASI PENYIMPANGAN DAN HASIL INVESTIGASI ⁴⁾			TINDAK LANJUT INVESTIGASI ⁵⁾
			PENGUNAAN	PEMANFAATAN	PEMINDAHTANGANAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. KPKNL ¹⁾						
1.						
2.....						
dst.						
II. KPB/Satker ²⁾						
1.						
2.....						
dst.						

.....)

Kepala Kanwil

.....

.....

Keterangan:

- 1) Diisi Nama KPKNL;
- 2) Diisi Nama dan Kode KPB/Satker;
- 3) Diisi Kode Barang, NUP, Uraian Barang;
- 4) Uraian indikasi penyimpangan dan hasil investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN;
- 5) Uraian tindak lanjut investigasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRU UMUM

KEPALA BAGIAN TUJUH KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984031001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

td.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO